

DAFTAR BACAAN

Buku

Dirdjosisworo dan Soedjono, *Hukum Perbankan di Indonesia: Bank umum*, Bandung, Mandar maju, 2003

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata BIsnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Hendro, Achmad, *Disharmoni Antara Ketentuan Kepailitan Dengan Ketentuan Di Bidang Perbankan Dalam Kepailitan Bank*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia edisi kedua*, Kencana, Jakarta, 2005.

Indonesia, Bank, *Bookled perbankan Indonesia 2010*, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indoneisa, Jakarta, 2010.

Ismail, Maqdir, *Bank Indonesia: Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi*, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2007

Kuncahyo, Arief Wind, *BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2007

Kusdarwanto, *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengawasan Perbankan setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, (Tesis Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Kencana Prenada, Jakarta, 2013.

Pramudya, Ardhita, *Skripsi: Kepailitan atas Bank yang Telah Dicaput Izin Usaha Perbankannya*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014.

Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2008.

-----, *"Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktek di Pengadilan"*, Kencana, Jakarta, 2009

Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

-----, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asas Sukses* (Penebar

Swadaya Grup), Jakarta, 2014

Usman, Rahmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.

Yumya, Afika, *Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008).

Webpage Internet

Kewenangan Bank Indonesia, tersedia pada

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/tujuan-dan-kewenangan/Contents/Default.aspx>

Bisdan Sigalinggi, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia* (Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013) h.107 diakses melalui

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39487/3/Chapter%20II.pdf>
diunduh tanggal 9 Oktober 2014

Tujuan OJK, tersedia pada <http://www.ojk.go.id/visi-misi>

Latar belakang OJK, http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Kuangan

Nina Yolanda, *Laporan Penelitian Analisis Hukum Putusan Pengadilan Niaga No. 21/Pailit/2001/PN.Niaga/Jak.Pst dalam Kasus Gugat Pailit Bank IFI terhadap Bank Danamon*, dikutip melalui:

<http://portal.kopertis2.or.id/jspui/bitstream/123456789/277/1/Penelitian%20Kepailitan%20Bank%20IFI.doc>

diunduh pada tanggal 15 September 2014

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- a. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

h. KUH Perdata